



**ROADMAP IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI BEKASI  
NOMOR HK.023.02/KEP.119/BAPENDA/2022**





## *Bupati Bekasi*

### KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR HK.02.02/Kep.119/Bapenda/2022

### TENTANG

### PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

#### BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital perlu adanya implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPIDD) dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), perlu disusun Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Research 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun



- 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
  23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.147-Reg/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 54);
27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110);
28. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.02.03.4 / Kep.73-BPKD/2022, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kemendagri No. 910/1866/SJ dan 1867 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Bupati Bekasi No. 973/Kep.210-Bapenda/2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bekasi;
  3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6622 / KU.12.01 / Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU, merupakan acuan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam transaksi pendapatan dan belanja dari cara tunai menjadi non tunai yang berbasis digital.
- KETIGA** : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
  - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah;

c. Mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah;

KEEMPAT : Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target tahun pencapaian Elektroniikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi; dan  
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 14 Februari 2022

**Plt. BUPATI BEKASI**



**AKHMAD MARJUKI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 114/D.02.02/Kep.119/BAPEL.04/2012  
 TANGGAL : 14/02/2012  
 TENTANG : PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI  
 TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

No.	Rencana Pengembangan	Rencana Awal	2011					2012					2013					2014					Keterangan						
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei							
1	Implementasi ETPD pada sistem informasi pemerintahan (SIPDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> <li>Profil Berbasis</li> </ul>																											<p>Peta Jalur Pemerintahan Sistem Pemerintahan Lokal</p>
2	Implementasi ETPD pada sistem informasi pemerintahan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pemantauan dan Pelaporan</li> <li>Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat</li> <li>Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan</li> <li>Peningkatan Keamanan dan Kerahasiaan Informasi</li> <li>Peningkatan Efektivitas dan Produktivitas</li> <li>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</li> <li>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Perencanaan</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Penganggaran</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Harta Milik Daerah</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Lahan dan Ruang</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Sampah</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Air dan Drainase</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Perumahan dan Perkotaan</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Wilayah Perbatasan</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Bencana</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Perubahan Iklim</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Kebudayaan, Sejarah, dan Pariwisata</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Sains, Teknologi, dan Inovasi</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Industri, Perdagangan, dan Jasa</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Hubungan Internasional</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Publikasi</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Sistem Pemerintahan Lokal</li> </ul>																											<p>Peta Jalur Pemerintahan Sistem Pemerintahan Lokal</p>







No.	Rencana Pengembangan	Tanggung Jawab	2017					2018					Keterangan				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok		Nov	Des		
4.	Organisasi Persewaan Ziarah	Perencanaan Persewaan Ziarah															
5.	Organisasi Persewaan Rumah Sani	Perencanaan Persewaan Rumah Sani															
6.	Perencanaan dan Pelaksanaan Persewaan	Perencanaan dan Pelaksanaan Persewaan															

PIK BUPATI BEKASI



AKHMAD MARZUKI

# **BAB 1**

## **OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**

### **I. Latar Belakang**

#### **1. Pendahuluan**

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat mendorong transformasi digital di daerah guna mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dan berkoordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Sebagai tindak lanjutnya Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 973/Kep.216-BAPENDA / 2021 membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada tanggal 10 Mei 2021. Walaupun Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* telah mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah secara terarah

#### **2. Perkembangan ETPD Kabupaten Bekasi**

Gambaran perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bekasi adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital. Manfaat yang diperoleh dengan adanya digitalisasi daerah bagi Kabupaten Bekasi adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan, sedangkan bagi masyarakat adalah untuk mempermudah proses

pembayaran menjadi lebih cepat dan aman. Berdasarkan Peta Transaksi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Bekasi Tahun 2021 sampai dengan Bulan November 2021 terlihat bahwa perkembangan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah telah bermigrasi dari pembayaran secara tunai menjadi pembayaran non tunai. Seiring perkembangan, transaksi pembayaran pun beralih menjadi Semi Digital dan Digital. Belum meratanya pemanfaatan kanal pembayaran non tunai berbasis digital menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bekasi. Prosentase pemanfaatan kanal pembayaran adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi mengelola Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB dan BPHTB. Pembayaran Pajak Daerah sudah dilaksanakan secara non tunai melalui kanal Teller & Loker Bank sebanyak 91.83%, ATM sebanyak 0.012%, Internet Banking / Mobile Banking sebanyak 3.84%, Agen Bank sebanyak 0,85% Dan E-Commerce sebanyak 3,46%. Pembayaran pajak daerah melalui ATM, Agen Bank dan E-Commerce adalah pembayaran Pajak PBB-P2. Terlihat bahwa untuk jenis pajak daerah lainnya belum maksimal dalam memanfaatkan kanal – kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank BJB.

b. Retribusi Daerah

Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah di Kabupaten Bekasi sudah dilaksanakan secara Non Tunai. Pembayaran Retribusi Daerah yang dibayarkan pada kanal Teller & Loker Bank berdasarkan kode bayar sebanyak 98.93% , QRIS sebanyak 0,28%, ATM sebanyak 0,02% dan Internet Banking / Mobile Banking sebanyak 0,77%. Hampir semua retribusi daerah di Kabupaten Bekasi membayar retribusi daerah melalui Kanal Teller & Loker Bank BJB. Kanal QRIS sudah digunakan untuk pembayaran retribusi penyediaan/penyedotan kakus pada Dinas Cipta Karya.

c. Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Untuk Transaksi Belanja Daerah sejak Tahun 2019 seluruhnya dilakukan secara non tunai melalui Sistem Bank BJB dan SP2D Online sesuai dengan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64

Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. SP2D Online merupakan Integrasi sistem keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem, dimana transaksi pembayaran belanja daerah secara non tunai dari Bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS) ataupun pembayaran dari kas daerah ke pihak penerima. Proses otomatisasi pemotongan dan penyetoran pajak atas belanja daerah dapat terwujud melalui implementasi penyetoran pajak ke kas daerah yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah. Total Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Kabupaten Bekasi terdiri dari :

1. Total realisasi belanja daerah yang merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih tahun 2021 sebesar Rp. 4.361.402.921.957,-
2. Total realisasi belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.371.503.949.790,-
3. Total realisasi belanja modal yang merupakan realisasi dari pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.195.528.278.391,-
4. Total realisasi belanja tidak terduga yang merupakan realisasi dari pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat yang tidak dapat di prediksi sebesar Rp. 55.408.628.643.-, dan
5. Total realisasi belanja transfer yang merupakan realisasi pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keluarga sebesar Rp. 738.962.065.133.-

Peta Transaksi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan  
Kabupaten Bekasi

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Transaksi Per Kanal Pembayaran Dalam Prosentase (%)							Jumlah	
		QRIS	Non Digital (Teller&Loket Bank)	ATM	EDC	Internet Banking/ Mobile Banking	Agen Bank	UE Reader		E-Commerce
A	Pajak Daerah	-	1.617.023.941.565,00	219.735.654,00	-	67.534.167.004,00	15.066.665.054,00	-	61.038.220.587,00	1.760.882.729.864,00
B	Retribusi Daerah	384.480.000,00	133.734.860.433,00	24.919.884,00	-	1.041.383.700,00	-	-	-	135.185.644.017,00

### 3. Kondisi Ekonomi

#### 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan wilayah (*place prosperity*), yang tidak identik dengan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (*people prosperity*). Oleh karena itu berdasarkan data PDRB pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah strategis pembangunan ekonomi berbasis digital sebagai dasar perumusan kebijakan dalam upaya mendistribusikan potensi kesejahteraan yang dimiliki wilayah, menjadi kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 77,79%, menjadi motor penggerak pembangunan yang dapat mengangkat dan mengembangkan sektor lainnya. Semakin tinggi nilai PDRB maka akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Bekasi.

#### 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Bekasi mengandalkan penerimaan daerah dari sektor industri melalui penerimaan Pajak Daerah dari Pajak PBB, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Perkembangan sektor industri juga dapat mengembangkan penerimaan Pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah serta penerimaan dari Retribusi Daerah. Namun seiring pandemi Covid – 19 yang terjadi sejak tahun 2020 membuat sektor industri di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan ekonomi yang berimbas pada

perkembangan pendapatan pada sektor hotel, restoran, parkir dan hiburan serta retribusi daerah. Dan untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi secara makro dan menstabilkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi melaksanakan 3 strategi penguatan dan pemulihan ekonomi. Strategi penguatan dan pemulihan ekonomi Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Penerapan protokol kesehatan secara ketat melalui penyusunan protokol Kesehatan untuk semua lini kehidupan bermasyarakat.
2. Penguatan sektor perekonomian melalui pengembangan layanan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri dan masyarakat tetap mampu mengembangkan perekonomian selama dan pasca pandemi yang tentu akan selaras dengan kemampuan membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melakukan kerjasama melalui:
  - a. PKS Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan Bank BJB tentang Layanan Pembayaran Pajak Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
  - b. PKS Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan PT. PLN tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Bekasi
  - c. PKS Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah
  - d. PKS Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan BPN
  - e. PKS Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Bapenda Kabupaten Bekasi tentang Pemanfaatan Nomor induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
  - f. PKS Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergitas Program Intensifikasi Pajak Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi Dan Bangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kabupaten Bekasi

g. Pembentukan Tim Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 973/Kep.470-Bapenda/2020.

h. Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 973/ Kep.216-BAPENDA / 2021

Peran pemerintah dalam percepatan implementasi digitalisasi diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor teknologi informasi yang menjadi tumpuan baru bagi pertumbuhan ekonomi. Arah pembangunan yang disokong dengan kebijakan implementasi teknologi akan membawa percepatan dalam pencapaian target-target pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIODE TAHUN 2018 -2021  
KABUPATEN BEKASI

No	Pajak Daerah			Retribusi Daerah		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	1.524.558.229.000	1.656.042.570.317	109	229.937.575.000	160.509.553.792	70
2	1.694.639.150.000	1.974.089.302.901	116	190.270.532.000	142.319.843.706	75
3	1.754.817.677.998	1.947.176.150.770	111	164.698.845.000	138.165.874.142	84
4	2.065.328.229.205	2.008.462.132.636	97	167.329.690.000	154.412.265.453	92

Secara detail realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bekasi selama 4 (empat) tahun sampai dengan minggu ke 3 (tiga) Desember 2021 terlihat tren realisasi retribusi daerah selama 4 (empat) tahun terakhir terdapat peningkatan rata-rata sebesar 5.5% per tahun, sedangkan tren realisasi pajak daerah cenderung lebih stabil.





#### 4. Kondisi Fisik Dan Geografis Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar-Dasar Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat dan tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai lahirnya Kabupaten Bekasi. Mengingat perkembangan Kabupaten Bekasi yang cukup pesat, maka berdasarkan PP No. 48 Tahun 1981 dibentuk Kota Administratif Bekasi yang meliputi 4 wilayah kecamatan, yaitu Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1996 tanggal 16 Desember 1996 Kota Administratif Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Bekasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2001 Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan, 180 desa, dan 7 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak di sebelah Utara Propinsi Jawa Barat dan berada pada dataran rendah, 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" – 6° 30' 6" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" – 107° 27'29" Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 127.388 Ha.

Kecamatan Muaragembong merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Bekasi yakni seluas 14.009 Ha atau 11% dari luas Kabupaten Bekasi. Adapun batas dari Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut (Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Peta Administrasi Kabupaten Bekasi) :

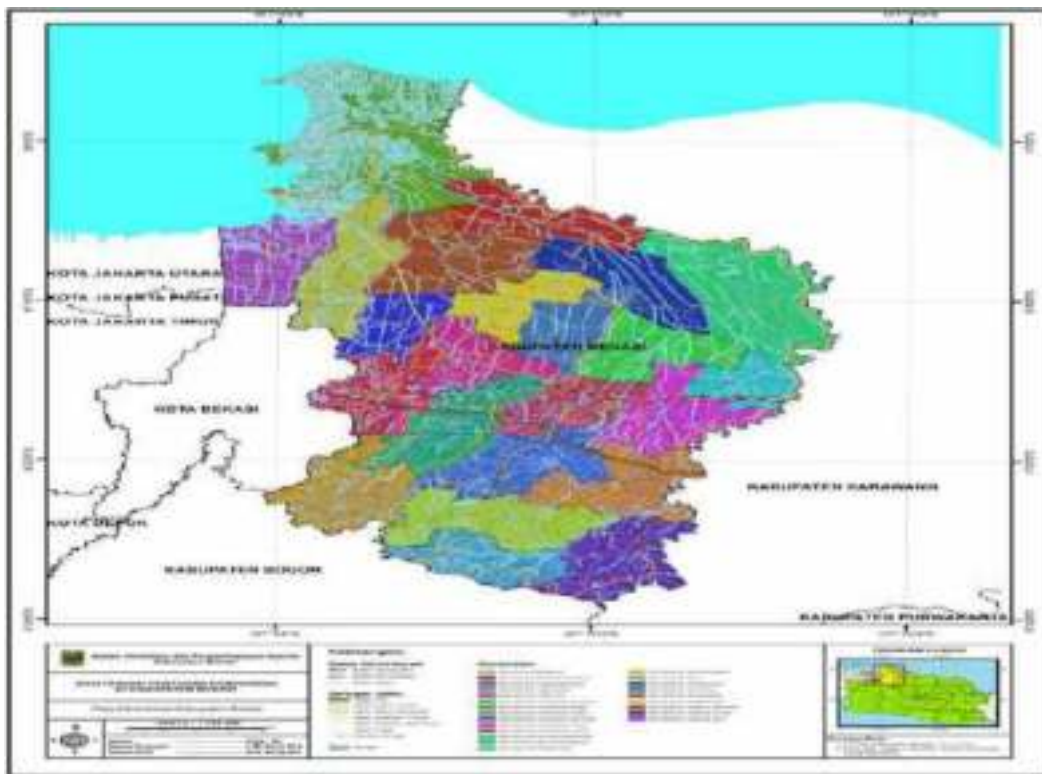
Utara : Laut Jawa  
Selatan : Kabupaten Bogor  
Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi  
Timur : Kabupaten Karawang

Kondisi topografi Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 2 yakni dataran rendah yang meliputi bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan, dengan ketinggian yang berkisar antara 6 – 115 mdpl dan kemiringan 0-25%. Suhu udara di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28°– 32°C. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bekasi**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Desa	Kelurahan
		Ha	%		
1	Setu	6.216	4,88	11	
2	Serang Baru	6.38	5,01	8	
3	Cikarang Pusat	4.76	3,74	6	
4	Cikarang Selatan	5.174	4,06	7	
5	Cibarusah	5.039	3,96	7	
6	Bojongmangu	6.006	4,71	6	
7	Cikarang Timur	5.131	4,03	7	1
8	Kedungwaringin	3.153	2,48	7	
9	Cikarang Utara	4.33	3,40	10	
10	Karang Bahagia	4.61	3,62	8	
11	Cibitung	4.53	3,56	6	1
12	Cikarang Barat	5.369	4,21	11	1
13	Tambun Selatan	4.31	3,38	9	1
14	Tambun Utara	3.442	2,70	8	
15	Babelan	6.36	4,99	7	2
16	Tarumajaya	5.463	4,29	8	
17	Tambelang	3.791	2,98	7	
18	Sukawangi	6.719	5,27	7	
19	Sukatani	3.752	2,95	7	
20	Sukakarya	4.24	3,33	7	
21	Pebayuran	9.634	7,56	12	1
22	Cabangbungin	4.97	3,90	8	
23	Muaragembong	14.009	11,00	6	
<b>Total</b>		<b>127.388</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>7</b>

*Sumber: BPS, Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2020*



**Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bekasi**

## 5. Kondisi Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Penanganan masalah penduduk tidak saja mengarah pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 127.388 Ha dengan Penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2019 mencapai 2.667.159 jiwa. Kabupaten Bekasi merupakan kawasan pemukiman dan kawasan industri yang cukup pesat perkembangannya. Hal ini disebabkan karena secara geografis letak Kabupaten Bekasi sangat strategis, yaitu berdekatan bahkan berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta dan disertai berbagai fasilitas/infrastruktur yang cukup lengkap. Kondisi ini pun merupakan salah satu daya tarik migran untuk pindah ke Kabupaten Bekasi. Pertambahan penduduk di Kabupaten Bekasi menjadi tak terelakan. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi dan untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah dari setiap kecamatan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kab. Bekasi Menurut Kecamatan Tahun 2019**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
	2019	
Setu	128.458	21
Serang Baru	116.09	18
Cikarang Pusat	61.132	13
Cikarang Selatan	140.721	27
Cibarusah	84.544	17
Bojongmangu	26.543	4
Cikarang Timur	96.892	19
Kedungwaringin	65.499	21
Cikarang Utara	207.232	48
Karangbahagia	106.527	23
Cibitung	201.921	45
Cikarang Barat	181.494	34
Tambun Selatan	389.04	90
Tambun Utara	155.393	45
Babelan	207.52	33
Tarumajaya	100.706	18
Tambelang	38.216	10
Sukawangi	45.356	7
Sukatani	80.67	22
Sukakarya	47.794	11
Pebayuran	95.746	10
Cabangbungin	51.912	10
Muaragembong	37.753	3
<b>Total</b>	<b>2.667.159</b>	<b>21</b>

*Sumber: BPS, Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 389.040 jiwa sementara jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Bojongmangu dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 26.543 jiwa.

## BAB 2 PENUNJANG IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

### II. Faktor Utama

#### 1. JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Implementasi konsep 'Smart City' dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah tercermin dari Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*. Maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berkualitas merupakan hal yang mutlak. Dan saat ini seluruh wilayah Kabupaten Bekasi sudah terjangkau jaringan sinyal kuat (2G,3G,4G dan 5G).





## 2. INFRASTRUKTUR PERBANKAN

Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank BPD BJB. Bank BJB mengembangkan konsep Smart City, melalui:

### A. Go Government

1. BJB *E-Tax* untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet Dan Pajak Air Tanah.
2. *E-Retribusi*
3. *SP2DD Online*

4. IBC
5. Siskeudes *Online*
- B. Go Branding
  1. Kartu ATM & Debit
  2. Kartu Keanggotaan
  3. Kartu Pegawai
  4. Kartu Kredit Pemerintah
- C. Pemanfaatan Kanal Pembayaran Bank BJB
  1. Teller & Loker Bank
  2. ATM
  3. *Internet Banking / Mobile Banking*
  4. Agen Bank
  5. *E-Commerce.*
- D. Pemanfaatan Kanal Pembayaran Pihak Ketiga Pembayaran Pajak PBB-P2 (Konsep Agregator)
  1. Indomaret
  2. Alfamaret
  3. Bukalapak
  4. Traveloka
  5. KASPRO
  6. PT. Pos Indonesia
  7. Blibli.com
  8. MASAGO
  9. DAN DAN
  10. Bayarin
  11. Gopay
  12. Shopee Pay
  13. BJB Bisa
- E. Integrasi dan Pengembangan Layanan *QRIS* Dan *VA Online*
- F. Pelayanan Keliling Pembayaran Pajak PBB-P2
- G. Pengembangan Sistem Informasi Realisasi Pendapatan Secara *Realtime*

### 3. LINGKUNGAN STRATEGIS

Pengembangan ekosistem digital masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Bank BJB untuk mewujudkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi menuju Go smart city and society melalui pelayanan :

- a. Go Living
  1. BJB DigiCash
  2. BJB QRIS

3. BJB *Virtual Account*
  4. BJB *Account Service*
  5. BJB *Payroll Service*
  6. BJB *Waterbill Servive*
  7. BJB *HoPe*
  8. BJB *EduPayment*
  9. Sistem Informasi Puskesmas
- b. Go Society
    1. *E-Ticketing*
    2. *E-Parking*
  - c. Go Environment
    1. CSR Kesehatan, Lingkungan Hidup Dan Pendidikan
  - d. Go Economy
    1. KCR & KUR bagi UMKM
    2. Kredit PNS & Purna Bakti
    3. BJB Bisa
    4. BJB Infrastruktur Daerah
    5. BJB Mesra





## BAB 3

### KENDALA DAN SOLUSI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

#### III. KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN ETPD

Peta Permasalahan ETPD diperoleh dari proses indentifikasi dan analisis kendala pelaksanaan ETPD dari setiap jenis pendapatan daerah. Identifikasi dan analisis dilakukan terhadap hambatan atau kendala yang dijumpai pada Peta Transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahan pelaksanaan ETPD Kabupaten Bekasi dapat dilihat baik dari sisi Kanal Pembayaran maupun Per Jenis Penerimaan. Adapun kendala pelaksanaan ETPD dari sisi Kanal Pembayaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Kendala Dan Solusi Pelaksanaan ETPD  
Kabupaten Bekasi**

No	Jenis Kanal	Pemda	Masyarakat	Bank BJB	Infrastruktur
1	Teller & Loket Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Jumlah Loket Bank di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi</li> <li>- Luasnya wilayah Kabupaten Bekasi</li> <li>- Tidak meratanya populasi penduduk pada tiap kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih menjadi kanal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Favorit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum menambah jumlah teller dan loket khusus pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- Kurangnya sosialisasi dalam memperkenalkan kanal lain selain teller &amp; loket</li> </ul>	Jangkauan internet gratis terutama di PD dan sarana publik belum optimal
2	ATM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Mesin ATM yang terbatas di lingkungan Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan wilayah Kabupaten Bekasi keseluruhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keengganan menggunakan ATM karena takut salah dan tertelan</li> <li>- Lebih memilih membayar pajak daerah dan retribusi daerah melalui teller dan Loket</li> </ul>		
3	Internet Banking/ Mobile Banking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampilan Internet Banking/Mobile Banking yang kurang user friendly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum seluruhnya masyarakat memiliki Mobile Banking/ Internet Banking</li> <li>- Masyarakat yang sudah memiliki Mobile Banking/Internet Banking enggan menggunakan karena takut salah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedikitnya jumlah nasabah yang memiliki aplikasi ini</li> <li>- Kurangnya sosialisasi kepada nasabah dan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi ini untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	
4	Agen Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim pemanfaatan dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pembayaran pajak daerah lainnya dan retribusi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat belum mengenal agen bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi kepada nasabah dan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi ini untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	
5	E-Commerce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim pemanfaatan dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbiasa memanfaatkannya untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi kepada nasabah dan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi ini untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	
6	QRIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah Kabupaten Bekasi belum memiliki QRIS sebagai sarana pembayaran</li> <li>- Penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran hanya pada retribusi penyediaan/penyedotan kakus pada Dinas Cipta Karya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib pajak daerah belum bisa membayar menggunakan QRIS</li> <li>- Belum seluruhnya masyarakat mengerti penggunaan QRIS</li> </ul>		

Adapun kendala pelaksanaan ETPD dari sisi jenis penerimaan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**PETA PERMASALAHAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		BAPENDA	Bank RKUD	Wajib Pajak	Infrastruktur TIK
<b>A Pajak Daerah</b>					
1	Pajak Hotel	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi / Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Keabsahan Tanda Terima Setoran Elektronik Hasil Pembayaran Pajak Melalui Kanal Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	
2	Pajak Restoran	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi /Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Keabsahan Tanda Terima Setoran Elektronik Hasil Pembayaran Pajak Melalui Kanal Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	
		4. Kurangnya Sosialisasi Dan Penyuluhan Terkait Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Restoran Jenis Jasa Boga Dan Cattering		4. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak Restoran Jenis Jasa Boga Dan Cattering Dalam Kewajibannya Melapor Dan Membayar Pajak Daerah	
3	Pajak Hiburan	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi / Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Keabsahan Tanda Terima Setoran Elektronik Hasil Pembayaran Pajak Melalui Kanal Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	
4	Pajak Reklame	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi / Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Keabsahan Tanda Terima Setoran Elektronik Hasil Pembayaran Pajak Melalui Kanal Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		BAPENDA	Bank RKUD	Wajib Pajak	Infrastruktur TIK
5	Pajak Penerangan Jalan	1. Belum Memiliki Peraturan Kepala Daerah Terbaru Mengenai Pajak Penerangan Jalan		1. Kurangnya Pemahaman Mengenai Proses Perhitungan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah	
		2. Kurangnya Sosialisasi Kepada Wajib Pajak PPJ Terkait Proses Perhitungan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah			
6	Pajak Parkir	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi / Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Keabsahan Tanda Terima Setoran Elektronik Hasil Pembayaran Pajak Melalui Kanal Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	
7	Pajak Air Bawah Tanah	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi / Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Keabsahan Tanda Terima Setoran Elektronik Hasil Pembayaran Pajak Melalui Kanal Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	
8	Pajak Sarang Burung Walet	1. Kurangnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemanfaatan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki	1. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak Secara Digital	1. Jaringan Telekomunikasi / Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Transaksi Digital Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Elektronifikasi Transaksi	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS		
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan	3. Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller	
9	Pajak Bumi Dan Bangunan	1. Wilayah Kabupaten Bekasi Yang Terdiri Dari 23 Kecamatan Dan 187 Desa/Kelurahan Dengan Kondisi Geografis Serta Karakteristik Masyarakat Yang Plural Menjadi Tantangan Tersendiri Dalam Upaya Transaksi Pembayaran Pajak PBB	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Perluasan Kanal Pembayaran Digital	1. Kecenderungan Membayar Pajak PBB Melalui Teller	1. Jaringan Telekomunikasi /Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Maksimalnya Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak PBB	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Pajak PBB Secara Digital	
		3. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan		
		4. Proses Layanan Pembayaran PBB Yang Terfokus Di Gedung BAPENDA Kabupaten Bekasi			
10	BPHTB	1. Belum Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Penerimaan Pajak daerah	1. Kurangnya Sosialisasi Terkait Perluasan Kanal Pembayaran Digital	1. Kecenderungan Membayar Pajak PBB Melalui Teller	1. Jaringan Telekomunikasi /Internet Yang Belum Merata Pada Setiap Kecamatan
		2. Belum Memiliki Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Tanda Terima Setoran Secara Elektronik	2. Bank BJB Belum Memfasilitasi Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS	2. Masyarakat Yang Belum Mengenal Kanal - Kanal Pembayaran Pajak BPHTB Secara Digital	
		3. Proses Layanan Pembayaran BPHTB Yang Terfokus Di Gedung BAPENDA Kabupaten Bekasi	3. Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan		



**PETA PERMASALAHAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
<b>B Retribusi Daerah</b>					
1	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital  2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan  3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah  4. Kecenderungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller & Loket	1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan  2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki  3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital  4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS	1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah  2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi	1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal  2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM
2	Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital  2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan  3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan  2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki  3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital  4 Baru Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS Statis	1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah  2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi	1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal  2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM
3	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran / Pengabuan mayat	1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital  2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan  3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah  4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller & Loket	1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan  2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki  3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital  4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS	1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah  2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi	1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal  2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM
4	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital  2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan  3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah  4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller & Loket	1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan  2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki  3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital  4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS	1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah  2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi	1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal  2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
5	Penyewaan Tanah dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecenderungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
6	LABKESDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecenderungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
7	Pemakaian Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecenderungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
8	Pemakaian Alat Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecenderungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
9	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Locket</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>1 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>
10	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelataran	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Pedagang Belum Sepenuhnya menabung uang hasil usahanya dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank.</p> <p>3 Masih banyak pedagang dan masyarakat berusia lanjut sehingga tidak memiliki dan tidak bisa menggunakan mobile banking, e money, ataupun e commerce</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>
11	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Los	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Pedagang Belum Sepenuhnya menabung uang hasil usahanya dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank.</p> <p>3 Masih banyak pedagang dan masyarakat berusia lanjut sehingga tidak memiliki dan tidak bisa menggunakan mobile banking, e money, ataupun e commerce</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>
12	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Kios	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Pedagang Belum Sepenuhnya menabung uang hasil usahanya dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank.</p> <p>3 Masih banyak pedagang dan masyarakat berusia lanjut sehingga tidak memiliki dan tidak bisa menggunakan mobile banking, e money, ataupun e commerce</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
13	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakan	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Pedagang Belum Sepenuhnya menabung uang hasil usahanya dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank.</p> <p>3 Masih banyak pedagang dan masyarakat berusia lanjut sehingga tidak memiliki dan tidak bisa menggunakan mobile banking, e money, ataupun e commerce</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>
14	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>
15	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loket</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>
16	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</p> <p>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</p> <p>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loket</p>	<p>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</p> <p>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</p> <p>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</p>	<p>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</p> <p>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</p>	<p>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</p> <p>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</p>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
17	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Locket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
18	Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Locket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
19	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Locket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>1 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
20	Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>



No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
21	Pengujian Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
22	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang Dan Bus Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
23	Pelayanan penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Petugas Penagih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
24	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loker</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
25	IMTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
26	Pengawasan Dan Pengendalian Menara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital</li> <li>2. Belum Siapnya SDM Dalam Pengelolaan Elektronifikasi Transaksi Dan Digitalisasi Layanan</li> <li>3. Belum Optimal Dalam Memanfaatkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>4. Tingginya Kecendrungan Membayar Retribusi Daerah Melalui Teller &amp; Loket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bank BJB Belum Memiliki Kantor Kas/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang Dan Akses ATM Yang Merata Di Setiap Kecamatan</li> <li>2 Kurangnya Sosialisasi Terkait Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang</li> <li>3 Bank BJB Belum Optimal Melakukan Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4 Belum Optimal Dalam Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingginya Preferensi Penggunaan Uang Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>1 Wajib Retribusi Masih Membutuhkan Bukti Setor Manual Sebagai Bukti Bayar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal</li> <li>2 Minimnya Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

Melihat Peta Permasalahan diatas, maka sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bekasi perlu dibuat Peta Penyelesaian Permasalahan. Peta Penyelesaian Permasalahan ini dibuat sesuai dengan Faktor Masalah yang terdiri dari Faktor Pemerintah Daerah, Faktor Masyarakat, Faktor Bank RKUD dan juga Faktor Infrastruktur.

#### Faktor Pemerintah Daerah

1. Memaksimalkan Kanal – Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB
2. Memanfaatkan Kanal Virtual Account Dan QRIS
3. Mengadakan Bimbingan Teknis Kepada Para Pegawai Di Lingkungan Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Mengenai Pengembangan Transaksi Digital
4. Mengembangkan Aplikasi Pendapatan Yang Terintegrasi
5. Mengimplementasikan serta penyempurnaan regulasi

#### Faktor Bank BJB

1. Membangun Budaya Menabung
2. Melakukan Sosialisasi Secara *Masive* Serta Mengedukasi Masyarakat/ Nasabah Tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Kanal – Kanal

Pembayaran Digital

3. Perluasan Jaringan ATM Dan Agen Bank
4. Mengembangkan Kanal *Virtual Account* Dan QRIS

Faktor Masyarakat

1. Merubah *Mindset* Atas Pembayaran Secara Tunai
2. Membangun Ekosistem Digital
3. Mengaplikasikan Teknologi Berbasis Web Pada *Handphone* Untuk Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Faktor Infrastruktur

1. Perluasan Jangkauan Internet Dan Penyediaan Jaringan *Free WiFi* Pada Area Publik
2. Penambahan *Bandwidth*

PETA SOLUSI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		BAPENDA	Bank RKUD	Wajib Pajak	Infrastruktur TIK
<b>A Pajak Daerah</b>					
1	Pajak Hotel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>2. Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>3. Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>3. Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>
2	Pajak Restoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>2. Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>3. Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>3. Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>
3	Pajak Hiburan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>2. Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>3. Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>3. Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		BAPENDA	Bank RKUD	Wajib Pajak	Infrastruktur TIK
4	Pajak Reklame	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>
5	Pajak Penerangan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Peraturan Kepala Daerah Terbaru Mengenai Pajak Penerangan Jalan</li> <li>Mensosialisasikan Kepada Wajib Pajak PPJ Terkait Proses Perhitungan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Penyuluhan Mengenai Proses Perhitungan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah</li> </ol>	
6	Pajak Parkir	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>
7	Pajak Air Bawah Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>
8	Pajak Sarang Burung Walet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		BAPENDA	Bank RKUD	Wajib Pajak	Infrastruktur TIK
9	Pajak Bumi Dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> <li>Melaksanakan Pelayanan keliling Di Setiap Kecamatan Pada Hari Sabtu</li> </ol>	<p>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</p> <p>Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</p> <p>Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</p> <p>4 Melaksanakan Pelayanan keliling Di Setiap Kecamatan Pada Hari Sabtu</p>	<p>Membangun Budaya Menabung</p> <p>Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</p> <p>Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>
10	BPHTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Pajak daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Menyusun Regulasi / Peraturan Yang Mengatur Tentang Keabsahan Tanda Terima Setoran Secara Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Mengembangkan Kanal Pembayaran Yang Tengah Tren Di Kalangan Milenial Seperti Virtual Account Dan QRIS</li> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Kebijakan Daerah Mengenai ETPD</li> <li>Merubah Mindset Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Terbiasa Membayar Pajak melalui Teller</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> </ol>

**PETA SOLUSI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
<b>B Retribusi Daerah</b>					
1	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
2	Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Mengembangkan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS Dinamis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
3	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran / Pengabuan mayat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
4	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
5	Penyewaan Tanah dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
6	LABKESDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
7	Pemakaian Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Comerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
8	Pemakaian Alat Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Comerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
9	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadaman Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Comerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
10	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelataran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Comerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
11	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Los	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
12	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Kios	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
13	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
14	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>



No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
15	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
16	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
17	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
18	Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
19	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
20	Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
21	Pengujian Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
22	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang Dan Bus Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>Menfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun Budaya Menabung</li> <li>Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

No	Jenis Pendapatan	Faktor Permasalahan			
		Perangkat Daerah Terkait	Bank RKUD	Wajib Retribusi	Infrastruktur TIK
23	Pelayanan penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
24	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
25	IMTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>
26	Pengawasan Dan Pengendalian Menara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Disediakan Oleh Bank BJB Dalam Proses Pembayaran Retribusi Daerah</li> <li>2. Mempersiapkan SDM Melalui Diklat / Bimtek Dalam Pengelolaan Transaksi Digital</li> <li>3. Mengoptimalkan Aplikasi Bebas Web Untuk Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Agen Bank Dan E-Commerce Pada Wilayah Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang/Kantor Kas/ATM</li> <li>2. Mensosialisasikan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Yang Dimiliki</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Perangkat Daerah Terkait Layanan Transaksi Digital</li> <li>4. Memfasilitasi Pembayaran Retribusi Daerah Dengan QRIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Budaya Menabung</li> <li>2. Mensosialisasikan Transaksi Non Tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan free wifi pada area publik</li> <li>2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM</li> </ol>

Dari gambaran peta penyelesaian permasalahan diatas, kolaborasi dari Pemerintah, Masyarakat dan Bank BJB selaku Bank RKUD sangat diperlukan guna mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Penetapan Target ETPD atas Pendapatan Tahun 2021-2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun kedepan. Target ETPD ini juga disusun atas dasar Gambaran Transaksi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari berbagai kanal pembayaran. Adapun Target ETPD Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada di bawah ini :

**TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Wajib Pajak /Jumlah Transaksi Pajak Daerah	Target ETPD										Penanggungjawab
			2021		2022		2023		2024		2025		
Pajak Daerah			Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	
1	Hotel	Wajib Pajak	80%	20%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	40%	60%	BAPENDA
2	Restoran	Wajib Pajak	80%	20%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	40%	60%	
3	Hiburan	Wajib Pajak	80%	20%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	40%	60%	
4	Reklame	Wajib Pajak	90%	10%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	60%	40%	
5	PPJ	Wajib Pajak	20%	80%	0	100%							
6	Sarang Burung Walet	Wajib Pajak	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	90%	10%	
7	Parkir	Wajib Pajak	80%	20%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	40%	60%	
8	Air Bawah Tanah	Wajib Pajak	90%	10%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	60%	40%	
9	PBB	Wajib Pajak	95%	5%	90%	10%	80%	20%	70%	30%	60%	40%	
10	BPHTB	Transaksi	95%	5%	90%	10%	80%	20%	70%	30%	60%	40%	

**TARGET ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Wajib Retribusi / Transaksi Retribusi	Target ETPD										Penanggungjawab
			2021		2022		2023		2024		2025		
Retribusi Daerah			Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	
1	Pelayanan Persampahan /	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	Perangkat Daerah Terkait  a. DPMTSP b. Disbudpora c. Dinas Kesehatan d. DSDABM & Bina Konstruksi e. Dinas Cipta Karya f. Dinas Lingkungan Hidup g. Disperkimta h. Dinas Pemadam Kebakaran i. Dinas Perdagangan j. Dinas Pertanian k. Dinas Perikanan l. Dinas Perhubungan m. Dinas Tenaga Kerja n. Diskominfosantik o. Bagian Umum
2	Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus*	Wajib Retribusi	80%	20%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	40%	60%	
3	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran /	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
4	Persetujuan Bangunan Gedung	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
5	Penyewaan Tanah dan Bangunan	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
6	LABKESDA	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
7	Pemakaian Laboratorium	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
8	Pemakaian Alat Berat	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
9	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadaman	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
10	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelataran	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
11	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Los	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
12	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Kios	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
13	Penyediaan Fasilitas Pasar/Perfokan Yang Dikontrakan	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
14	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
15	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
16	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
17	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
18	Kesmavet	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
19	Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
20	Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
21	Pengujian Kendaraan Bermotor	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
22	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
23	Pelayanan penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal	Wajib Retribusi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
24	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan	Wajib Retribusi	100	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
25	IMTA	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	
26	Pengawasan Dan Pengendalian Menara	Transaksi	100%	0%	95%	5%	90%	10%	85%	15%	80%	20%	

Dapat dilihat Prosentase target capaian dari tahun ke tahun atas digitalisasi transaksi pendapatan daerah baik dari Pajak Daerah maupun dari Retribusi Daerah. Penetapan pendapatan pajak daerah yang diprioritaskan dalam digitalisasi transaksi yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak PPJ dan pajak parkir karena bersifat Self Assesment. Untuk Pajak PBB-P2, BPHTB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Reklame dan pajak sarang burung walet menjadi prioritas selanjutnya. Penyusunan target ETPD pada retribusi daerah Kabupaten Bekasi dengan melihat peta solusi yang ada, diperlukan waktu yang lebih lama dalam hal perencanaan, dan implementasi ETPD. Untuk Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Dinas Cipta Karya menjadi prioritas pengembangan kanal QRIS dinamis. Berdasarkan atas Target ETPD tersebut maka disusun Rencana kerja yakni Rencana Kerja Tahun 2021-2022, dan sebagai kelanjutan atas Rencana Kerja 2 tahun tersebut disusun Rencana Kerja 2023-2025.

### **1. Rencana Kerja Tahun 2021 - 2022**

Rencana Kerja Tahun 2021-2022 disusun berdasarkan atas peta penyelesaian permasalahan yang mencakup tujuan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Bekasi yakni :

1. Meningkatnya Pemahaman Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
2. Meningkatnya Ekosistem Digital Non tunai di Masyarakat
3. Meningkatnya Perluasan Dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Memperkuat regulasi dan peraturan Kabupaten Bekasi

Adapun Rencana Kerja ETPD Kabupaten Bekasi Tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA ETPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 -2022

No	Uraian Kegiatan	Tahapan	Target	PenanggungJawab
1	a Mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi	a Sosialisasi Dan Edukasi Untuk Pembentukan Ekosistem Digital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi	2021:100%	- Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi  - Bank BJB
	b Mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online	b Sosialisasi Dan Edukasi Untuk Pembentukan Ekosistem Digital Bagi Wajib Pajak Di Lingkungan Kabupaten Bekasi	2021 : 100%	- BAPENDA - Bank BJB
	c Penyusunan Atau Merevisi Peraturan Kepala Daerah tentang Pelayanan Sistem Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Elektronik	c Melakukan Revisi Atau Pembuatan Peraturan Kepala Daerah Untuk Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Elektronik	2022 : 100%	- BAPENDA - Perangkat Daerah - Pemungut Retribusi - Bagian Hukum
2	Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada ASN Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Web R	Edukasi Kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah	2021 : 40% 2022 : 60%	- BAPENDA - Perangkat Daerah - Pemungut Retribusi - Bank BJB
3	Memaksimalkan Penggunaan Kanal Pembayaran Melalui ATM, Internet Banking/Mobile Banking, Agen Bank Dan E-Comerce Dalam Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Dalam Memanfaatkan Kanal - Kanal Pembayaran Digital	2021 : 10% 2022 : 20%	- BAPENDA - Perangkat Daerah - Pemungut Retribusi - Bank BJB
4	Optimalisasi Hasil Pemasangan Alat Perekam Transaksi Elektronik (Tapping Box)	Pemasangan Alat Perekam Transaksi Kepada Wajib Pajak Self Assesment	2021 : 70% 2022 : 100%	- BAPENDA - Bank BJB
5	Menggunakan Aplikasi Web R Untuk Mendapatkan Kode Bayar Pembayaran Retribusi :  1 IMB 2 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran / Pengabuan mayat  3 Penyewaan Tanah dan Bangunan  4 Pemakaian Alat Berat  5 Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat Selaku Wajib Retribusi Untuk Menggunakan Kanal - Kanal Pembayaran Digital Dalam Membayar SKRD	2021 : 20% 2022 : 60%	- BAPENDA - Perangkat Daerah - Pemungut Retribusi - Bank BJB

No	Uraian Kegiatan	Tahapan	Target	PenanggungJawab
6	Penggunaan Kanal Pembayaran Melalui Virtual Account Dan QRIS Untuk Pembayaran Pajak Daerah	Pengembangan Virtual Account Dan QRIS Untuk Pembayaran Pajak Daerah	2022 : 30%	- BAPENDA - Bank BJB
7	Penggunaan Kanal Pembayaran Melalui QRIS Untuk Pembayaran Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Penyempurnaan Sistem	2021 : 80% 2022 : 100%	- Dinas Cipta Karya - Bank BJB
8	Perluasan Jangkauan Internet Dan Fasilitas Free WiFi	Memperluas Cakupan Jangkauan Internet Serta Penambahan Fasilitas Wifi Gratis Di Area Publik Dan Pelayanan Publik	2021 : 3 Tempat 2022 : 7 Tempat	
9	Menimalisasi Preferensi Penggunaan Uang Tunai Pada Masyarakat	- Mensosialisasikan Gerakan Gemar Menabung - Perluasan ATM Dan Agen Bank	2021 : 30% 2022 : 60% (Nasabah) 2021 : 30% 2022 : 60%	- Bank BJB - Bank BJB
10	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Penggunaan Kanal-Kanal Pembayaran Dari Gadget	2022 : 200 WP Mewakili	- BAPENDA - DISKOMINFOSANTIK - Bank BJB
11	Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Melaksanakan Evaluasi Dan Monitoring Terhadap Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui Aplikasi Berbasis Web	2021 : 2 Laporan 2021 : 2 Laporan	

## 2. Rencana Kerja Tahun 2023-2025

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Kerja Tahun 2021-2022, maka untuk keberlanjutan dan peningkatan perluasan digitalisasi daerah, perlu disusun Rencana Kerja untuk Tahun 2023-2025. Rencana Kerja Tahun 2023-2025 ini berisi kegiatan lanjutan dari Rencana Kerja sebelumnya dan terdapat juga Kegiatan baru. Kegiatan ini sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bekasi. Adapun Rencana Kerja ETPD Tahun 2023-2025 Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

### RENCANA KERJA ETPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 -2025

No	Uraian Kegiatan	Tahapan	Target	PenanggungJawab
1	Sosialisasi Pemanfaatan Kanal Digital Dalam Pembayaran Pajak Daerah	- Tahun 2023 Sosialisasi Secara Online Dan Offline - Tahun 2024 Sosialisasi Secara Online Dan Offline - Tahun 2025 Sosialisasi Secara Online Dan Offline	200 Wajib Pajak 200 Wajib Pajak 200 Wajib Pajak	- BAPENDA - Bank BJB - BAPENDA - Bank BJB - BAPENDA - Bank BJB



No	Uraian Kegiatan	Tahapan	Target	PenanggungJawab
2	Pembayaran Pajak Daerah Melalui Kanal Digital & QRIS	- Tahun 2023 - Tahun 2024 - Tahun 2025	40% 50% 60%	- BAPENDA - Bank BJB
3	Sosialisasi Pemanfaatan Kanal Digital Pembayaran Dalam Retribusi Daerah	- Tahun 2023 -Tahun 2025 Bimbingan Teknis WebR		- BAPENDA - Perangkat Daerah Terkait Bank BJB
4	Pembayaran Retribusi Daerah Melalui Kanal Digital & QRIS	- Tahun 2023 - Tahun 2024 - Tahun 2025	10% 15% 20%	- Perangkat Daerah Terkait - Bank BJB
5	Digitalisasi UMKM	- Tahun 2023 -Tahun 2025 Perluasan UMKM On Boarding - Implementasi Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pelayanan Dan Pembayaran - Kerjasama Dengan Bank BJB Dalam Penyaluran Digital Financing	70%	- Dinas Koperasi & UKM - Bank BJB
6	Digitalisasi Sektor Pariwisata	- Tahun 2023 - Tahun 2025 Implementasi Pembayaran Non Tunai Pada Tiket Masuk	100%	- Dinas Pariwisata - DISPORA - Bank BJB
7	Digitalisasi Pasar	- Tahun 2023 - Tahun 2025 Digitalisasi End To End	80%	- Dinas Perdagangan - Bank BJB
8	Digitalisasi Pembayaran Zakat	- Tahun 2023 - Tahun 2025 Digitalisasi Layanan	100%	- Bank BJB
9	Penguatan Infrastruktur Pendukung Digitalisasi	- Tahun 2023 - Tahun 2025 Kerja Sama Dengan Penyedia Layanan Telekomunikasi	100%	- DISKOMINFOSANTIK

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023-2025 ini akan dilakukan evaluasi kembali pada saat penyusunan RPJMD berikutnya dan akan disesuaikan kembali agar tercipta keselarasan antara program dan kegiatan.

Untuk melihat detail pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021-2022 akan ditampilkan detail kegiatan dalam Timeline di bawah ini :

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

No.	Rencana Pengembangan	Rencana Aksi	2021				2022				2023				2024				2025				Keterangan			
			Triwulan				Triwulan				Triwulan				Triwulan				Triwulan							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
<b>Implementasi ETPD Pada Pembayaran</b>																										
1	Implementasi ETPD pada sisi <i>front end</i> pembayaran Pajak Daerah	Implementasi Dan Perluasan ETPD Pada Perluasan Kanal Pembayaran Dan Penggunaan QRIS : - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir - Pajak Air Bawah Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak BPHTB - Pajak PBB-P2																					Potensi Pemanfaatan Kanal Pembayaran Digital			
2	Implementasi ETPD pada sisi <i>front end</i> pembayaran Retribusi	Implementasi Dan Perluasan ETPD Pada Perluasan Kanal Pembayaran Dan Penggunaan QRIS: - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Penguban Mayat - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Penyewaan Tanah dan Bangunan - LABKESDA - Pemakaian Laboratorium - Pemakaian Alat Berat - Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelataran - Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Los - Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Kios - Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan - Pelayanan Tempat Khusus Parkir - Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya - Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bit atau Benih Tanaman - Kesmavet - Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bit atau Benih Ikan - Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Pengujian Kendaraan Bermotor - Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - IMTA - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi																					Potensi Pemanfaatan Kanal Pembayaran Digital			
3	Implementasi ETPD	Pemanfaatan Aplikasi Pembayaran Berbasis <i>WEB/Host to Host</i> Migrasi Pembayaran Tunai Menjadi Pembayaran Semi Digital Dan Digital Pengembangan Inovasi Daerah Terkait Layanan Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan kepada ASN Terkait Pembayaran Non Tunai																					Potensi Pemanfaatan Kanal Pembayaran Digital			
4	Optimalisasi Pemanfaatan Dan Perluasan Alat Perekam Transaksi Elektronik ( <i>Tapping Box</i> )	Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Alat Perekam Transaksi Yang Terpasang Hingga Mencapai 100%																					BAPENDA			
5	Optimalisasi Pemanfaatan <i>Internet Banking Corporate</i> (IBC)	Optimalisasi pemanfaatan IBC yang telah terdaftar hingga mencapai 100%																					Bank BJB			
6	Penguatan Aspek Legal Pengembangan ETPD	Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Bupati) Terkait ETPD Yang Memuat: - Kewajiban laporan implementasi ETPD - Monitoring dan evaluasi implementasi ETPD - <i>Reward and punishment</i>																					BAPENDA, BKAD, BAG, HUKUM			
7	Penguatan Sistem Monitoring PAD	Pembuatan Serta Integrasi <i>Dashboard</i> Keuangan Daerah (Pendapatan Dan Belanja) Yang Dapat Di Akses Masyarakat Umum Secara <i>Real Time</i>																					BAPENDA, BKAD, Dan Bank BJB			
8	Standarisasi dan Sentralisasi Data PAD untuk mempermudah H2H dengan BJB	Pembuatan Data Hub Sebagai Sentral Informasi Dari Setiap Perangkat Daerah																					DISKOMINFOSANTIK			
9	Pengembangan Dan Penguatan SPBE	Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi dan Layanan Administrasi Berbasis Digital																					DISKOMINFOSANTIK			
<b>Implementasi ETPD Pada Masyarakat</b>																										
1	Sosialisasi Dan Edukasi Mengenai Digitalisasi Pembayaran Non Tunai	Sosialisasi Dan Edukasi Secara <i>Online</i> Atau <i>Offline</i> Kepada Perangkat Daerah Sosialisasi Dan Edukasi Baik Melalui Media Cetak Maupun Online Kepada Masyarakat																					TP2DD KAB. BEKASI			
2	Peningkatan Kapasitas Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Focus Group Discussion</i> , Lokakarya, Webinar Dan Seminar Khususnya Terkait Dengan Keamanan Informasi, Serta Perluasan Implementasi ETPD Dan Transaksi Non Tunai Di Masyarakat																					TP2DD KAB. BEKASI			
3	Elektronifikasi Sektor Transportasi	Implementasi kanal non tunai untuk pembayaran transportasi umum Seperti angkot dan Bis																								
4	Digitalisasi UMKM	Perluasan UMKM <i>on Boarding</i> Perluasan Implementasi Penggunaan Teknologi Digital Dalam Transaksi UMKM																					DISHUB Dan Bank BJB Dinas Koperasi Dan UKM			
5	Digitalisasi Sektor Pariwisata	Implementasi Pembayaran Non Tunai: - Sektor Pariwisata - Sektor Perbelanjaan																					Dinas Pariwisata			
6	Digitalisasi Pembayaran Zakat/Infak	Implementasi Pembayaran Zakat dan Infak																					Baznas			
7	Digitalisasi Pembayaran Rumah Sakit	Digitalisasi Pembayaran Rumah Sakit																					RSUD			
8	Penguatan Infrastruktur Pendukung Digitalisasi	Menjaga Pasokan Listrik Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat Perluasan Akses Internet Kerjasama Dengan Penyedia Layanan Untuk Penambahan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)																					Perangkat Daerah Terkait			

## BAB 4 DOKUMENTASI

### Pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bekasi



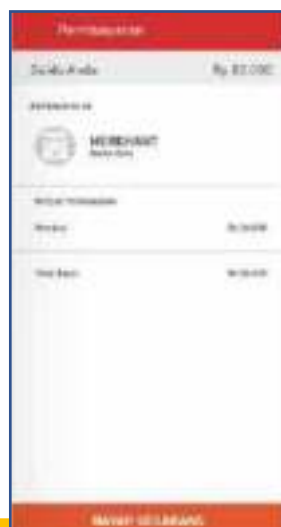
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MENGENAI RENCANA STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMAKAIAN QRIS TERKAIT IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)



RAPAT KOORDINASI TP2DD KABUPATEN BEKASI  
DENGAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA BARAT SERTA SERAHTERIMA PIALA



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MENGENAI RENCANA STRATEGI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMAKAIAN QRIS TERKAIT IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)



PEMBAHASAN INDEX PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
(ISPBE)



GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP II TERKAIT TINDAK  
LANJUT PERLUASAN KANAL PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2  
MENGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT DAN QRIS DINAMIS

